

Muh. Akbar Luthfi
Pendidikan Sejarah 2011
Akbarluthfi004@gmail.com

Abstract

Muh. Akbar Luthfi, 2018, Center Point of Indonesia Makassar In Its Development Process for Coastal Communities (2009-2017). Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University

This study aims to find out the process of implementation of Mega Project Center Point of Indonesia from the beginning of the emergence and how the implementation process until 2017, in addition this research also aims to mengetahui activities perceived by coastal communities of Makassar who reside or who previously worked around the area CPI project during project. The research method used by the author with the stages of the Heuristik in the form of literature research and field peneltitian, then Criticism source, Interpretation with related sources, and last Histiografi.

From the research results show that Center Point of Indonesia Makassar began initiated in 2009, and began running in early 2014. In the process of implementing the project reap a lot of polemic, since the beginning of the initiative until the end of 2017. The results also indicate that the running Center Center project of Indonesia which is characterized by reclamation or reclamation activities around Losari Beach brings its own impacts to coastal communities residing in the project area. Residents of Lae-Lae, Residents of Kec. Maccini, Residents of Kec. Mariso felt the impact of the influential CPI project in terms of their social and economic aspects.

Keywords: Center Point Of Indonesia, Coastal Communities, Reclamation.

Abstrak

Muh. Akbar Luthfi, 2018, Center Point of Indonesia Makassar Pada Proses Pembangunannya terhadap Masyarakat Pesisir (2009-2017). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Mega Proyek *Center Point of Indonesia* dari awal munculnya serta bagaimana proses pelaksanaan sampai pada tahun 2017, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui aktifitas yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Makassar yang bertempat tinggal atau yang sebelumnya bekerja di sekitar area Proyek CPI selama proyek berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dengan tahapan yakni Heuristik dalam bentuk penelitian pustaka dan peneltitian lapangan, kemudian Kritik sumber, Interpretasi dengan sumber-sumber terkait, dan terakhir Histiografi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Center Point of Indonesia* Makassar mulai digagas pada tahun 2009, dan mulai berjalan di awal tahun 2014. Dalam proses pelaksanaan proyek tersebut banyak menuai polemik, sejak awal digagas hingga akhir tahun 2017. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berjalannya proyek *Center Point of Indonesia* yang ditandai dengan aktifitas penimbunan atau reklamasi disekitaran Pantai Losari membawa dampak tersendiri bagi masyarakat pesisir yang berada disekitaran area proyek. Warga Lae-Lae, Warga Kec. Maccini, Warga Kec. Mariso merasakan dampak tersendiri dari jalannya proyek CPI yang berpengaruh dari segi aspek sosial dan ekonomi mereka.

Kata Kunci : Center Point Of Indonesia, Masyarakat Pesisir, Reklamasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang meningkat tiap tahunnya. Kepadatan penduduk pada suatu negara sangat mempengaruhi tingkat perkembangan ekonominya. Pengelolaan sumber daya manusia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi satu hal yang mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah, sementara disisi lain di daerah perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, memiliki problem tersendiri dengan keterbatasan ruang yang mesti diiringi penjaminan kesejahteraan masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah mesti memikirkan sebuah solusi untuk menangani kondisi tersebut, salah satunya dengan membuat daerah reklamasi.

Salah satu kegiatan dalam penulisan karya ilmiah yang patut dilakukan adalah proses kegiatan tinjauan pustaka. Dimana tinjauan pustaka ini merupakan suatu langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian-kajian teoritis dan kajian metodologi. Tinjauan pustaka sendiri bertujuan sebagai pendukung, penguat, maupun pembenaran terhadap data yang telah ditemukan.

Pada dasarnya penelitian yang mengkaji tentang Sejarah proyek reklamasi di Kota Makassar belum pernah ditemukan oleh penulis, terlebih ketika ditinjau dengan jalannya proyek CPI di Kota Makassar masih terbilang sejarah yang sifatnya kontemporer di masa kini. Penulisan terkait proyek reklamasi sejauh ini yang penulis dapatkan hanya berbicara dalam kajian sosial dan hukumnya saja. Penulis coba mengangkat beberapa penulisan sebelumnya terkait reklamasi dan mencoba menjadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini nantinya.

Disisi lain dalam pembangunan Proyek CPI, wilayah pesisir pantai Makassar juga dihuni oleh beberapa penduduk yang memilih menetap di kawasan tersebut. Masyarakat pesisir yang juga bagian dari penduduk Makassar yang mestinya juga mendapat dampak yang positif dari hadirnya Proyek CPI di area pemukiman mereka tanpa mengganggu rutinitas yang tiap harinya mereka jalani serta tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat pesisir yang dimaksud dalam hal ini memiliki posisi penting dalam sejarah lokal Makassar tidak terlepas dari budaya yang tertanam menyebutkan bahwa, orang Makassar yang berdiam di pesisir pantai dan pulau-pulau diberi nama Tupabbiring yang berarti orang pesisir atau orang pantai. (Lathief, 2014:15)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini Menggunakan Metode Sejarah, Menurut (Sjamsuddin, 2007) Metode Sejarah Memiliki Tahapan Kerja, yaitu: *Heuristic*, tahap ini

Merupakan tahap Awal dalam penelitian dengan Mengumpulkan dan Menghimpun data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan objek yang di teliti.

a. Penelitian Pustaka

Merupakan langkah pengumpulan sumber dengan jalan mencari buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul yang telah dikaji. Kajian pustaka ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan masalah pendidikan yang dapat diperoleh dari Perpustakaan, Koran, Toko Buku dan Balai Arsip.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan caramendaatangi atau berbincang langsung dengan masyarakat pesisir Kota Makassar di lokasi khususnya:

- 1) Kec. Tamalate.
- 2) Kec. Mariso.
- 3) Pulau Lae-lae.

Kritik sumber atau *Penelitian Bahan*, Setelah data terkumpul maka penulis menilai atau mengkritik sumber yang telah di peroleh baik berupa kritik ekstern maupun intern terhadap data yang berhasil dihimpun dalam pengumpulab data. *Interpretasi atau Penafsiran* setela diadakan kritik maka diadakan Interpretasi atau penafsiran terhadap data sejarah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan terhadap fakta seobjektif mungkin .Sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan sifatnya masih bisu. Oleh karna itu, perlu ditafsirkan oleh sejarawan atau peneliti. *Historiografi Penulisan Sejarah* , yaitu proses penulisan sejarah banyak aspek yang terkait didalamnya. Dalam tahap ini semua data yang telah terseleksi (fakta) dapat disusun kembali menjadi satu kisah sejarah yang lengkap berdasarkan urutan kejadiannya guna untuk dipaparkan dalam suatu kisah sejarah.

Pembahasan

A. Konsep Perencanaan Proyek CPI (*Center Point of Indonesia*) di Kota Makassar

Pemerintah Provinsi Sul-Sel menggagas pembangunan satu kawasan ruang publik untuk mengembalikan landmark Kota Makassar, sebuah ikon baru rencananya akan dibangun di sekitar pesisir pantai Kota Anging Mammiri. Dalam perencanaannya, kawasan ini nantinya juga akan dibangun 11 sarana publik antara lain plaza, *diplomatic village*, *waterway parade*, balai rakyat, dan tugu 1.000 pahlawan Indonesia. Selain itu, akan dibangun pula sebuah masjid yang akan menjadi *centre point Indonesia*. Untuk merealisasikan pembangunan kawasan seluas 157 Hektare (Ha) ini, Pemprov Sulsel membutuhkan dana awal sebesar Rp 150 miliar untuk melakukan penyiapan lahan berupa pematangan lahan. Dana ini belum termasuk pembangunan fisik dalam kawasan tersebut yang diperkirakan menelan dana sebesar Rp 600 miliar.

Keunikan lain dari rencana pembangunan Karebosi Baru ini adalah karena dikelilingi dengan laut dan bisa dilayari dengan perahu Phinisi. Dalam kawasan pemicu ini juga akan dibangun masjid yang akan menjadi simbol baru Kota Makassar. Masjid ini juga yang akan menjadi lambang *Centre Point Indonesia*. Rencananya, masjid yang berlantai dua ini akan dibagi menjadi dua, yakni lantai atas menjadi ruang religi dan lantai bawah menjadi ruang publik (Acen, 2008).

Pada proyek reklamasi ini, KSO Ciputra Yasmin memulai dengan prioritas pengerjaan lahan yang akan diserahkan untuk Pemerintahan Provinsi seluas 50.47 Ha, sebagai dedikasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara hukum, KSO Ciputra Yasmin hanya berkewajiban untuk menimbun dan membentuk lahan reklamasi saja, tetapi khusus di lokasi ini akan dibuatkan pantai buatan dari pasir putih yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti: tempat parkir, toilet, mushola, fasilitas jajan kaki lima, kursi taman, lanskap yang menarik, dsb, sebagai persembahan khusus KSO Ciputra Yasmin bagi Masyarakat Sulawesi Selatan.

B. Berjalannya Proyek CPI di Area Pesisir Kota Makassar

Reklamasi atau penimbunan laut terjadi dipesisir Makassar mulai gencar dilakukan sejak tahun 2003 hingga tahun 2010. Kasus penimbunan pesisir Mariso, Pembangunan hotel di belakang Polair, penimbunan pesisir Buloa, dan terakhir reklamasi pantai oleh pihak GMTDC. (Acen, 2008) Pemkot Makassar juga membuat master plan rencana reklamasi kawasan strategis bisnis global terpadu Makassar yang memasukkan rencana pembangunan Centre Point of Indonesia atau COI/CPI di dalam-nya yang dinamakan Equilibrium Center Park (ECP).

Selanjutnya di tahun 2011 setelah terbitnya izin AMDAL, COI berganti nama menjadi CPI (Center Point of Indonesia). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kota tepatnya pada bulan Maret dan April guna mengatur batas wilayah, master plan, serta tata cara perizinan pembangunan CPI, hasil rapat koordinasi tersebut dipaparkan pada keputusan Gubernur No. 2026/VI Tahun 2011. Dari 14 perusahaan yang dirilis oleh media sebagai calon pemegang tender, PT. Yasmin Bumi Asri akhirnya terpilih sebagai pihak pengembang dalam proyek CPI.

Izin reklamasi oleh pihak pengembang berhasil disetujui dan direkomendasikan oleh Walikota Makassar dengan Surat Izin No.650/33/DTRB/VI/2012 pada tahun 2012, sekaligus oleh pihak pengembang dan pihak Pemrov melakukan sosialisasi pembahasan AMDAL di Hotel Swiss Bellin, Panakukang Makassar. Rapat sosialisasi tersebut dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, investor, Dinas Tata Ruang Makassar, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perwakilan masyarakat. Di tahun berikutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan tentang izin lokasi reklamasi pada kawasan pusat bisnis terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan strategis provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013; dan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 644/6273/TARKIM tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, persiapan pekerjaan proyek CPI pun dimulai pada akhir tahun 2013 ditandai dengan aktifitas reklamasi pada pesisir pantai Losari.

Sebagai tahapan awal penimbunan dilakukan di sekitaran pantai pada kawasan daerah Tanjung Delta Maccini Sombala, Kec. Tamalate. Tercatat sekitar 43 keluarga yang bermukim di wilayah tersebut menjadi imbas dari pembebasan lahan untuk proyek ini. Sejak dimulainya proyek CPI ini yang di tandai dengan aktifitas penimbunan dengan adanya penggusuran, sejak saat itu juga mulai bermunculan gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat dan para aktifis diantaranya dari warga Tanjung Delta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan dari kalangan Mahasiswa. Munculnya protes dari berjalannya proyek CPI dari berbagai kalangan secara umum menganggap bahwa proyek CPI yang berujung pada reklamasi pantai Makasar akan membawa dampak negatif terhadap warga pesisir secara khusus dan warga Makassar secara umum. Secara umum pandangan tersebut menganggap bahwa proyek ini akan berimbas pada kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam di Kota Makassar, serta akan berpengaruh pada kesenjangan masyarakat pesisir Kota Makassar.

Dari protes yang datang silih berganti, reklamasi masih berlangsung sampai di 23 Desember 2014, dampak Pembangunan tak kunjung selesai, dana

APBD semakin menipis, CPI tampak indah sebagai sebuah konsep besar. Sebab itu, banyak pihak menuding ada dugaan kuat korupsi di dalamnya. DPRD Sulsel pun tidak tahu menahu kemana uang negara mengalir. Hasil temuan beberapa LSM bahwa CPI sebenarnya tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di awal tahun 2015, kegiatan reklamasi atau penimbunan laut yang dilakukan pengembang di hentikan oleh pansus RT/RW dan Pemkot Makassar. Penghentian ini sifatnya hanya sementara, menunggu kepastian alokasi ruang reklamasi yang akan dibahas oleh pansus Ranperda RTRW Makassar 2015-2035. Masyarakat sipil dan akademisi telah memberikan pandangan terkait reklamasi pesisir Makassar dalam rapat dengar pendapat pansus DPRD Kota Makassar. Pada waktu yang sama terbentuk Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar (ASP) yang terdiri dari beberapa kalangan yang menolak adanya proyek CPI. ASP menolak secara tegas alokasi ruang reklamasi, penolakan ini berlangsung bertepatan pada pembahasan Ranperda RTRW Makassar 2015-2035 di DPRD Kota Makassar, menurutnya komersialisasi pesisir Makassar untuk kepentingan pengembangan kota yang nyatanya lebih diarahkan pada kepentingan privatisasi ruang publik untuk tujuan-tujuan komersil, bisnis dan ekonomi semata. ASP juga berpandangan bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan hendaknya azas Setelah beberapa tahun proyek ini berjalan morat-marit dengan kucuran dana APBD Sulsel sebesar Rp 164,1 miliar, beberapa pihak menanggapi tidak ada perkembangan mencengangkan dari proyek tersebut.

Kenyataan dilapangan hanyalah aktivitas penimbunan, pengerasan konstruksi jalan tanah dan pembangunan jembatan. Kini pembangunannya CPI tidak lagi mendapat dukungan penganggaran oleh DPRD Sul-Sel. Walaupun sebelumnya pembangunan CPI belum diakomodir dalam Perda Tata Ruang kota Makassar dan perda zonasi pesisir, proyek reklamasi CPI terus berjalan, dengan inisiatif Gubernur Sul-Sel untuk menanggulangi anggaran dalam pengerjaan proyek CPI. kehati-hatian, early warning, haruslah dikedepankan. Perda RTRW kota Makassar yang merupakan produk hukum yang mengatur penggunaan ruang telah mengakomodir alokasi ruang reklamasi di dalamnya. Pelaksanaan reklamasi sebagaimana di atur dalam RTRW nantinya akan memberikan dampak meluas bagi wilayah pesisir kota Makassar, baik secara ekologi, ekonomi, social, budaya dan HAM.

Akhir tahun 2015 ditandai dengan berdirinya rangka jembatan utama pada kawasan CPI, jembatan ini nantinya akan menyerupai jembatan Rialto di Venesia, (SanovraJr, 2016). yang nantinya akan berbentuk seperti rumah adat tongkonan. Selain pembangunan jembatan Utama, juga dengan dimulainya pembangunan Wisma Negara yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017.

Masuknya tahun 2016 pembangunan proyek ini terus berlanjut, proses timbunan pun semakin melebar pada kawasan tersebut. Setelah proses penimbunan mulai meluas, pada tahun ini pembangunan pada kawasan ini juga dimulai dengan melanjutkan pembangunan jembatan utama sebagai akses masuk utama dan Wisma Negara serta persiapan pembangunan Masjid 99 Kuba. Pembangunan Masjid 99 Kuba atau Masjid CPI ini mulai dilaksanakan ditandai peresmian dengan peletakan batu pertama masjid yang diletakkan langsung oleh Syahrul Yasin Limpo di Kawasan CPI. Hadir dalam peresmian CPI yakni Ketua DPRD Sul-Sel M. Roem, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang, dan Walikota Makassar Danny Pomanto.

Ditahun ini juga ratusan warga Kecamatan Mariso Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan demonstrasi di tiga titik menolak penimbunan dan pembangunan laut. Dalam aksinya di tiga titik seperti di Kantor Balai Kota, Polrestabes dan DPRD Makasar mereka membentangkan spanduk dan berisi pesan agar pihak terkait segera melakukan penindakan tegas terhadap pengembang tersebut. Puncaknya protes terhadap jalannya proyek CPI berujung pada sidang gugatan pelaksanaan CPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) pada bulan April 2016. Sejak masuknya gugatan telah terlaksana beberapa sidang untuk membahas perkara yang diajukan ke pengadilan, beberapa tahapan pemeriksaan berkas-berkas yang terkait serta pemeriksaan lingkungan di kawasan proyek telah dilaksanakan pada proses pengadilan. Putusan akhir di persidangan ini pada 28 Juli 2016 dalam perkara Nomor : 11/G/LH/2016/PTUN.MKS antara WALHI selaku Penggugat melawan Gubernur Sul-Sel selaku Tergugat dan PT. YASMIN BUMI ASRI selaku Tergugat II Intervensi, menyatakan Gugatan WALHI tidak dapat diterima dengan pertimbangan Gugatan telah kadaluarsa ditinjau dari terlaksananya Proyek CPI dan dari masuknya Gugatan tersebut, serta WALHI tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam kasus reklamasi CPI.

Tahun 2017 perkembangan pembangunan Proyek CPI terus berlanjut, ditahun ini Jembatan Utama terlihat sudah rampung dan pembangunan masjid serta Wisma Negara hanya membutuhkan beberapa waktu sebelum perampungannya. Pada tahun ini koordinator atau penanggung jawab kerjasama Reklamasi CPI, Soerapto Budisantoso menyatakan bahwa ditahun ini Proyek CPI akan membuat pantai pasir putih sebagai fasilitas umum. (Maharani, 2017). Timbunan pasir putih sudah ditangkan ke kawasan tersebut dan nantinya tempat wisata pantai pasir putih ini rencananya akan dibuka untuk umum serta tanpa memungut biaya untuk mengaksesnya. Perkembangan Proyek CPI semakin nyata pada tahun ini, perencanaan yang diiringi dengan pembangunan pada kawasan ini terus berlanjut. Pada awal tahun ini ditandai juga dengan pemberian sebidang tanah kepada Pemkot Makassar seluas 3,3 Hektar oleh Pengelola Wisma Negara

CPI, yang pada perencanaannya September 2017 mendatang Walikota Makassar dan PT Citraland bersepakat melakukan penandatanganan penyerahan antara PT Citraland dengan Pemkot Makassar, dengan rencana tersebut Danny Pomanto berencana memindahkan Kantor Balaikota Makassar dikawasan ini. (SanovraJr, 2017). 1 Juni 2017 tahap pertama dari pembangunan Mesjid CPI 99 Kuba telah rampung, selanjutnya masjid ini setelah benar-benar selesai dalam pengerjaannya dapat menampung 3.880 orang, mezzanine 1.005 orang dan pelataran suci 8.190 orang, dengan total keseluruhan 13.075 jamaah (Fadly , 2017)Sampai pada akhir tahun 2017 proses reklamasi dari proyek CPI terus berlanjut, mega proyek yang diperkirakan akan memakan anggaran trilyunan rupiah ini mulai menampakkan sosoknya di Kota Makassar. Area Proyek CPI kini telah berdiri jembatan panjang diatas lahan reklamasi tersebut yang nantinya akan menjadi gerbang masuk ke area tersebut, Wisma Negara, Mesjid 99 Kuba, dan pantai pasir putihnya. CPI lambat laun akan menjadi pusat Destinasi Kota Makassar, sebuah Icon baru Kota Makassar yang dari sebagian orang menyebutnya sebagai kota masa depan. Meski dengan berbagai protes dan tak jarang penolakan keras dari berbagai kalangan, sampai sekarang proyek ini terus berlanjut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang di peroleh ;

1. Proyek Center Point of Indonesia (CPI) merupakan mega proyek yang berawal dari Master Plan yang digagas oleh pihak Pemerintah provinsi, dengan tujuan menjadikan area bisnis global terpadu yang menyajikan beberapa fitur untuk peningkatan Kota Makassar Kedepannya.
2. Proyek CPI mulai digagas pada tahun 2009 dengan menetapkan Kec. Tamalate dan Kec. Mariso sebagai wilayah pelaksanaannya.
3. Proyek CPI resmi berjalan pada akhir tahun 2013 disusul setelah terbitnya AMDAL (analisis dampak lingkungan) dan terbitnya surat pejianjian kerjasama pelaksanaan CPI antara Gubernur Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Putera.
4. Berjalannya Proyek CPI sejak awal tahun 2014 hingga tahun 2016 banyak menuai protes bahkan kritikan dari pelaksanaannya dikarenakan beberapa izin terkait proyek yang belum lengkap seperti, keabsahan AMDAL dan tidak adanya perencanaan sebelumnya pada RANPERDA RT RW terkait proyek tersebut, sampai pada implementasi dari pekerjaan Proyek CPI yang bagi sebagian warga pesisir dan berbagai kalangan justru membawa dampak yang negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kota Makassar.

Daftar Pustaka

Acen, 2008. *Pemprov Gagasan Bangun Ikon Baru*. [Online]
Available at: SKYSCRAPERCITY.COM
[Accessed 20 Agustus 2016].

Fadly, M. A., 2017. *Mesjid CPI 99 Kubah Muat 13 Ribu Jamaah, Tahap Pertama Dianggarkan Hampir 60 M*, Makassar: Tribun Timur.

Koddeng, Baharuddin. Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Makassar Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Pantai Barambong-Celebes Convention Centre), *Jurnal Hasil Penelitian Fakultas teknik Unhas*, Makassar, 2011. Volume 1.

Lathief, H., 2014:15. *Orang Makassar*. Yogyakarta: Papat Daya.

Maharani, I., 2017. *Pantai Pasir Putih Hampir Jadi !Seperti ini Sekarang*, Makassar: Tribun Timur.

SanovraJr, 2016. *Pembangunan Jembatan CPI*, Makassar: Tribun Timur.

SanovraJr, 2017. *Ini Lokasi Rencana Pembangunan Kantor Balaikota Makassa*, Makassar: Tribun Timur.

Sjamsuddin, . H., 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.